

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kerjasama pada hakekatnya mengindikasikan adanya dua pihak atau lebih yang berinteraksi secara dinamis untuk mencapai suatu tujuan bersama. Unsur lebih dari satu pihak (multipihak), selalu menggambarkan suatu himpunan yang satu sama lain saling mempengaruhi sehingga interaksi untuk mewujudkan tujuan bersama penting dilakukan, apabila hubungan atau interaksi itu tidak ditujukan pada terpenuhinya kepentingan masing-masing pihak, maka hubungan yang dimaksud bukanlah suatu kerjasama (Clistrap *dalam* Roestiyah, 2008).

Kerjasama multipihak dianggap sebagai suatu upaya yang tepat dalam mencari solusi dari suatu permasalahan yang dihadapi dalam lingkup yang cukup besar, dan dapat bersinergi dengan sektor ataupun organisasi lain untuk tetap dapat memadukan pengembangan potensi daerah karena menyadari disetiap sektor tidak dapat diatasi hanya oleh diri sendiri. Menciptakan suatu bentuk kerjasama yang efektif tidaklah sederhana, perlu serangkaian proses yang dilalui untuk dapat mencapai tujuan bersama (Ameli dan Kayes *dalam* Riyanto, 2010).

Pedoman pengembangan kawasan pertanian yang terdapat dalam Peraturan Menteri Pertanian No. 50 Tahun 2012, untuk membangun dan mengembangkan kawasan pertanian dibutuhkan kerjasama multipihak yang terkoordinasi dan terencana dengan baik. Pihak-pihak yang terlibat harus melaksanakan peran masing-masing dan saling bekerjasama disetiap rantai nilai usaha pertanian yang ada agar tujuan pengembangan kawasan dan peningkatan keuntungan dapat tercapai. Dalam menjalankan peran untuk menciptakan suatu kerjasama yang dibutuhkan akan terjadi suatu interaksi atau hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi antar pihak yang terlibat.

Menurut Slamet (2003), program penyuluhan pertanian yang efektif dan efisien dapat dikembangkan oleh tenaga-tenaga profesional di bidang penyuluhan pertanian. Hal ini hanya memungkinkan apabila program penyuluhan diwadahi oleh sistem

kelembagaan penyuluhan yang jelas dan pelaksanaannya didukung oleh tenaga tenaga yang kompeten di bidang penyuluhan.

Sejalan dengan pemikiran Slamet (2003) tersebut, pemerintah telah melakukan berbagai upaya, diantaranya telah dicanangkan Revitalisasi Penyuluhan Pertanian (RPP) yang merupakan suatu upaya mendudukkan, memerankan, memfungsikan, serta menata kembali penyuluhan pertanian agar terwujud kesatuan pengertian dan kesatuan arah kebijakan. Salah satu tonggak pelaksanaannya yaitu dengan disahkannya Undang-undang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (SP3K) No.16 Tahun 2006.

Undang-undang ini merupakan suatu titik awal dalam pemberdayaan petani melalui peningkatan sumberdaya manusia dan kelembagaan para penyuluh Pegawai Negeri Sipil (PNS), penyuluh swasta, dan penyuluh swadaya (petani). Disebutkan dalam kebijakan ini bahwa penyuluh swasta dan swadaya membantu penyuluh pemerintah dalam format kemitraan. Berdasarkan peranan ketiga penyuluh yang ada ditunjukkan bahwa peran penyuluh masih lemah, sementara integrasi, koordinasi, dan kerjasama antar penyuluh baik secara vertikal maupun horizontal juga tidak berjalan efektif, maka diperlukanlah suatu bentuk kerjasama yang tepat untuk menciptakan suatu kegiatan penyuluhan pertanian yang terintegrasi dan terkoordinasi dengan baik. Kegiatan pembangunan pertanian akan lebih mantap jika ditunjang oleh berperannya penyuluh yang berarti, karena kemampuan pemerintah sangatlah terbatas. Oleh sebab itu, kegiatan penyuluhan merupakan potensi pembangunan baik dalam jumlah maupun mutu (Lidwina, 2017).

B. Rumusan Masalah

Salah satu kegiatan di bidang pertanian yang memberikan kontribusi besar adalah usahatani hortikultura. Komoditas hortikultura merupakan salah satu komoditas pertanian yang mempunyai potensi untuk dikembangkan, mengingat wilayah Indonesia sebagian besarnya cocok untuk tanaman hortikultura (Zulkarnain dalam Humayra, 2017).

Bawang merah merupakan salah satu komoditi unggulan daerah Kabupaten Solok. Salah satu daerah sentra produksi bawang merah di Kabupaten Solok adalah Kecamatan Lembah Gumanti. Bawang merah merupakan komoditas yang paling banyak ditanam di Kecamatan Lembah Gumanti dibandingkan dengan komoditas yang lainnya, dengan luas tanam 7.919 ha, luas panen 7.340 ha, dan produksi 82.685,2 ton/tahun (Badan Pusat Statistik, 2018). Pengembangan pusat hortikultura menjadikan kawasan ini menjadi sentra pertanian bawang merah.

Saat ini pemerintah sudah membangun kolaborasi dengan multipihak yaitu antara pemerintah Kabupaten Solok dengan Bank Indonesia (BI) perwakilan Sumatera Barat demi memajukan pertanian bawang merah Kabupaten Solok, dengan membangun kesepakatan kerjasama pengembangan klaster bawang merah. Ruang lingkup dari kerjasama ini meliputi pendampingan masyarakat petani dalam mengolah dan mendistribusikan produksi bawang merah, pengelolaan, serta peningkatan akses usaha. Berdasarkan temuan di lapangan, walaupun kerjasama ini telah terbentuk tetapi faktanya petani bawang merah masih sering kali dihadapkan pada berbagai persoalan karena minimnya pengetahuan dan informasi yang didapatkan dalam menjalankan kegiatan usahatani.

Penyuluhan pertanian mempunyai peranan penting dalam menjamin keberlanjutan kegiatan usahatani bawang merah agar selalu dapat menyelesaikan setiap permasalahan pertanian yang dihadapi petani, namun kenyataannya saat ini rata-rata kegiatan penyuluhan yang dilakukan masih terfokus pada aspek on-farm saja, petani menyatakan kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan saat ini belum dapat mengatasi masalah keseluruhan yang dihadapi petani terkait usahatani bawang merah.

Keberhasilan kegiatan penyuluhan tidak terlepas dari kerjasama yang dijalankan oleh semua pihak yang terlibat, permasalahan yang ditemukan berdasarkan keadaan di daerah penelitian yaitu kerjasama antara pihak-pihak yang terlibat yaitu petani, penyuluh swadaya, penyuluh swasta, penyuluh pemerintah/PNS, serta pemerintah terkait belum berjalan dengan baik, belum adanya kesesuaian tujuan antara masing-masing penyuluh dalam menjalankan tugasnya, sehingga kegiatan penyuluhan yang telah dilaksanakan tidak berjalan optimal.

Banyaknya persoalan yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan disebabkan oleh terbatas peran dan fungsi dari masing masing kategori penyuluh, pemerintah, petani itu sendiri. Banyak kekurangan yang dihadapi oleh masing masing pihak tersebut, maka diperlukan suatu inovasi baru untuk mengisi setiap kekurangan yang dihadapi oleh masing-masing pihak tersebut. Penciptaan *digital platform* dalam memfasilitasi kegiatan penyuluhan disepanjang aktivitas rantai nilai merupakan salah satu media yang dapat mensinergikan peranan semua pihak yang terlibat, semua pihak dapat menjalankan perannya masing-masing, dan saling mengisi kekurangan masing-masing.

Dalam penelitian ini penulis meneliti terkait pelaksanaan penyuluhan dan kerjasama multipihak yang telah dijalankan dan sebenarnya dibutuhkan dalam kegiatan penyuluhan hortikultura bawang merah, peneliti akan fokus pada *stakeholder* yang terlibat dalam kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan yaitu para penyuluh lapangan yang terdiri dari penyuluh swasta, penyuluh swadaya, dan penyuluh pemerintah/PNS sebagai fasilitator pelaksanaan program penyuluhan hortikultura bawang merah, pemerintah selaku pengambil kebijakan, serta tentunya petani sebagai aktor utama maupun sasaran utama dari kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan. Kajian akan dilakukan secara mendalam sehingga hasil temuan kedepannya dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk kerjasama yang lebih baik antar *stakeholder* yang terlibat.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, dapatlah dirumuskan pertanyaan penelitian, yaitu :

1. Bagaimana pelaksanaan penyuluhan dan kerjasama multipihak disetiap aktivitas rantai nilai bawang merah saat ini ?
2. Bagaimana bentuk penyuluhan dan kerjasama multipihak yang dibutuhkan disetiap aktivitas rantai nilai bawang merah?

Untuk menjawab pokok masalah tersebut peneliti melakukan penelitian dengan judul **“Kajian Kerjasama Multipihak Penyuluhan Hortikultura (Bawang Merah) di Sepanjang Aktivitas Rantai Nilai di Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok”**.

C. Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mendeskripsikan pelaksanaan penyuluhan dan kerjasama multipihak yang telah dilaksanakan disepanjang rantai nilai bawang merah (pra produksi-produksi-pascapanen-pemasaran).
2. Mengidentifikasi bentuk penyuluhan dan kerjasama multipihak yang dibutuhkan disepanjang aktivitas rantai nilai bawang merah.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat dan berguna bagi pihak yang tertarik dengan pelaksanaan penyuluhan multipihak dalam usahatani hortikultura khususnya usahatani bawang merah (*Allium asconicum, L*).

1. Bagi peneliti : Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sarana belajar untuk memahami permasalahan yang menjadi topik penelitian.
2. Bagi akademisi : Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan pertimbangan bagi penelitian lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian ini.
3. Bagi stakeholder yang terlibat : Penelitian ini dapat menjadi acuan kedepannya untuk menjalankan kegiatan kerjasama multipihak dalam penyuluhan pertanian bawang merah yang lebih baik.

